



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAJ YASIN
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 400604

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.592.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/340 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
2. Tanah Seluas 324 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/500 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 635.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/28 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 1700 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 33.500.000
6. Tanah Seluas 6524 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 915.000.000
7. Tanah Seluas 70 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 39.000.000
8. Tanah Seluas 700 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 335.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO 28 D Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



3. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, TOYOTA DYNA BOK 110 ST Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO AT S 28 D CW Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
6. MOTOR, YAMAHA MIO J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	68.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.232.201.087
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.000.000.000
Sub Total	Rp.	5.227.701.087
III. HUTANG	Rp.	525.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.702.701.087

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.